

BAB II

KASUS PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA DAN FILIPINA

2.1 Kasus Pendanaan Terorisme Di Indonesia

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat serta diiringi dengan meningkatnya perkembangan arus barang, dana dan lintas batas telah membuka peluang penting bagi pertumbuhan politik, ekonomi dan sosial suatu negara. Situasi ini tentu dapat menimbulkan banyak dampak, baik positif maupun negatif. Adanya dampak positif akan membawa kepada kemajuan di berbagai bidang, sedangkan munculnya dampak negatif akan menimbulkan banyak tindakan kriminal baik di dalam maupun melewati lintas batas negara atau luar negeri. Salah satu tindakan kriminal tersebut yaitu tindakan terorisme yang pendanaannya diambil dari hasil pencucian uang. Hal ini menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk melakukan pengendalian terhadap aliran uang gelap yang beredar melalui perbankan khususnya. Seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, praktik pencucian uang selalu berkaitan dengan terorisme (Jojarth, 2014).

Terorisme sebagai tindak kejahatan khusus perlu pendanaan yang biasanya merupakan hasil dari pencucian uang. Kejahatan yang melintasi batas negara ini memiliki modus operandi yang terkadang memunculkan kendala dalam proses pemberantasannya. Maka dari itu, negara harus berupaya secara maksimal dalam memberantas sesuai dengan prinsip hukum dalam negeri atau biasa disebut hukum domestik dan juga hukum internasional yang berlaku. Kejahatan yang sulit dideteksi ini memiliki dampak kerugian yang besar bagi masyarakat ataupun negara. Sehingga keduanya harus saling bersinergi dalam mencegah dan

menanggulangnya. Di Indonesia sendiri, praktik pendanaan terorisme banyak yang berasal dari pencucian uang yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup domestik namun juga melibatkan negara lain.

Kemudahan akses dan lalu lintas pendanaan antar negara disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi ke dalam sistem keuangan di bank sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. Antara terorisme dan pencucian uang mempunyai hubungan yang erat dimana pendanaan dalam terorisme diperoleh dari hasil pencucian uang. Terorisme sendiri merupakan kejahatan yang dianggap melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan baik di dalam negeri ataupun di dunia internasional. Maka dari itu, negara harus melakukan upaya seperti salah satunya upaya preventif dalam memberantasnya melalui penelusuran-penelusuran terhadap jaringan yang membackup pendanaan mereka (Hartanto, 2016).

Pendanaan terorisme dapat dilakukan dengan berbagai bentuk modus pembayaran misalnya pembayaran melalui paypal, kotak amal, open donasi dan melalui tenaga kerja yang bekerja diluar negeri (TKI/TKW). Keberadaan *fintech* diharapkan dapat memudahkan akses layanan keuangan masyarakat, namun pada kenyataannya juga dapat digunakan sebagai modus operandi tindak kejahatan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 105 transaksi dalam *fintech* yang aliran dananya digunakan untuk mendanai terorisme. Uang tersebut dibagi menjadi pecahan-pecahan kecil sehingga sulit untuk di deteksi (Aloysius Harry Mukti, 2018).

Berdasarkan data dari *The Financial Action Task Force* (FATF) di tahun 2018 selaku badan independen pembuat kebijakan terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, terdapat beberapa sumber utama darimana pendanaan terorisme berasal, antara lain :

1. Dana yang berasal dari induk organisasi teroris. Dukungan dana yang berasal dari induk ini biasanya berjumlah sangat besar dimana dana tersebut akan digunakan untuk merekrut anggota baru dan berbagai kegiatan guna memperluas jaringan kelompok mereka dari berbagai negara.
2. Donasi secara langsung ataupun secara virtual yang berasal dari *Non Profit Organization* (NPOs). Dana ini biasanya berasal dari patungan perorangan dengan jumlah yang kecil-kecil. Selain itu, dapat pula berasal dari sumbangan organisasi nirlaba yang ikut serta dalam mendukung kegiatan terorisme tersebut. Donasi ini tidak jarang dilakukan melalui kekuatan media sosial yang mana dimanfaatkan juga untuk merekrut anggota baru.
3. *Platform virtual Crowd Funding dan Crowd Lending*. Platform ini tidak banyak digunakan oleh kebanyakan masyarakat bahkan dianggap sebagai alat transaksi virtual yang dianggap tidak lazim. Dana diperoleh dari akun virtual di media sosial yang aksesnya melintasi batas negara.
4. Melalui kegiatan kriminal seperti perdagangan satwa liar illegal, perdagangan narkoba, serta transaksi illegal lainnya.
5. Melalui transaksi Hawala yaitu transaksi yang sering dilakukan melalui perantara TKI/TKW. Meskipun jarang digunakan di Indonesia, namun transaksi ini sudah sering digunakan di luar negeri. Transaksi hawala ini

disebut sebagai transaksi yang memiliki kerahasiaan dan kredibilitas yang tinggi sehingga potensi ini justru digunakan oleh oknum pelaku kejahatan supaya tidak mudah dibongkar kejahatannya (Imam Subandi, 2018).

Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus terorisme dengan berbagai macam modus pendanaannya. Baru-baru ini yang paling marak dibicarakan yaitu pendanaan yang bersumber dari uang donasi. Hal ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi pemerintah Indonesia karena dapat mengganggu integritas dan mengancam stabilitas sistem perekonomian negara. Kejahatan pendanaan terorisme berkedok donasi kemanusiaan ini masih terus dalam penelusuran satuan tugas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) (Kencana, 2021).

Beberapa kasus pendanaan terorisme berhasil diungkap oleh Densus 88 Antiteror Polri. Pada contoh kasus pertama, terungkap bahwa kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) telah menerima pendanaan sejumlah 70 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Lembaga Amal Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) 70 miliar tersebut tidak serta merta mereka dapatkan secara langsung dari satu pintu saja, namun mereka kumpulkan dari berbagai sumber dana (Dirgantara, 2021). Dana dari Jamaah Islamiyah (JI) dialihkan melalui sebuah kelompok, salah satunya bernama Sasana. Kelompok Sasana ini dilihat mirip dengan kelompok bela diri pencak silat. Kader-kader Jamaah Islamiyah melakukan latihan fisik di Sasana ini. Adapun tujuan dari dilakukannya latihan fisik dan bela diri yakni sebagai bekal untuk melawan aparat kepolisian. Selain kelompok Sasana, terdapat Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan

kemanusiaan yang ikut serta dalam pendanaan terorisme ini, yaitu Syam Organizer (Dirgantara, 2021).

Berdasarkan laporan dari densus 88, dana yang terkumpul berjumlah 124 miliar sejak tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,2 miliar telah dialirkan ke JI. Dana yang dikelola oleh Syam Organizer tersebut bersumber dari donasi masyarakat dan juga perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Sejak tahun 2016 hingga 2021, laporan terkait pendanaan terorisme kepada PPATK berjumlah 4.093 laporan. Dari banyaknya laporan tersebut, 207 diantaranya di analisis untuk dilaporkan ke POLRI dan BIN (Secha, 2021). Keberadaan Yayasan Syam Organizer merupakan afiliasi dari Jamaah Islamiyah (JI). Cara yang mereka gunakan untuk memperoleh dana yaitu dengan menyebarkan kotak amal berbentuk celengan ke masyarakat. Mereka mengambil simpati masyarakat dengan membawa embel-embel isu Suriah dan Palestina seperti memberi sumbangan dana, mengirim air bersih bahkan membangun rumah untuk warga di negara-negara tersebut (Dirgantara, 2021).

Kasus lain yang pernah terjadi yaitu pendanaan terorisme yang dilakukan oleh tiga tokoh agama yaitu Farid Okbah, Zain An-Najah dan Anung Al Hamat. Setelah menjalani penangkapan dan penyelidikan ketiga tokoh tersebut memang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI). Berdasarkan pernyataan Wijayanto yang merupakan salah satu anggota JI yang telah tertangkap terlebih dahulu, para tokoh agama tersebut memperoleh sumbangan dana dari berbagai kegiatan sosial di masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA). Sejak Wijayanto ditangkap pada tahun 2019 lalu, Densus 88 semakin memperoleh

kemudahan akses dalam mengusut kasus tindak pendanaan terorisme tersebut beserta kelompok JI yang terlibat (BBC News, 2021).

Guna mempertahankan eksistensi, biasanya suatu kelompok atau organisasi memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Begitu juga dengan JI, kelompok teroris dengan jaringan yang besar ini selalu melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendanaan baik yang bersumber dari internal maupun secara eksternal. Sumber internal itu berasal dari infaq bulanan seluruh anggota sedangkan sumber eksternal diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA). Pada pendanaan yang bersumber dari eksternal, mereka berkamufase pada kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan pendidikan contohnya. Selain melakukan penggalangan dana, ketiga tokoh agama tersebut juga mempunyai peran lain dalam kelompok mereka.

Di pesantren JI, Farid mendidik dan melakukan pelatihan kepada para ustadz dan kader-kader terkait ajaran dalam kitab wahabi. Farid ini juga merupakan penghubung antara teroris JI dengan teroris Al Qaeda di Afghanistan. Selain Farid, ada Ahmad Zain An-Najah yang juga dekat dengan petinggi jaringan JI. Zain merupakan alumni dari pondok pesantren yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyar dan Abdullah Sungkar yang mana mereka adalah petinggi-petinggi JI. Selain itu, Zain juga memiliki kedekatan dengan Abdul Hakim, mantan anggota ISIS yang telah ditangkap pada tahun 2015 lalu. Di JI, Zain sering memberi ceramah yang berisikan propaganda radikalisme (Dedy Priatmojo, 2021). Seiring majunya perkembangan teknologi, pendanaan terorisme dilakukan dengan berbagai modus

yang berubah-ubah. Selalu ada alternatif yang disiapkan apabila jalan utama yang mereka tempuh tidak membuahkan hasil.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu penyalahgunaan *financial technology* (*fintech*) oleh Bahrin Naim yang merupakan salah satu tokoh yang menggerakkan pendanaan untuk aksi terorisme di Indonesia. Bahrin menggunakan alat pembayaran virtual seperti Paypal dan Bit Coin untuk transaksinya. Bahkan dia juga menggunakan modus dengan cara mengimpor rokok ilegal ke seluruh penjuru dunia untuk mendapat sumber dana. Fakta lain yang berhasil diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dimana selain uang tunai dan asset, para pelaku dapat menikmati hasil kejahatannya dalam bentuk teknologi informasi (*laundering offshore*). Adanya inovasi dalam keuangan digital, tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilakukan dengan cara *crowd funding* serta *virtual currency* sebagai sumber kegiatan terorisme. Fenomena tersebut dianggap meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme lebih tinggi. Tidak hanya itu saja, modus lain yang dilakukan baru-baru ini yakni dengan cara merubah kegiatan ilegal menjadi legal seperti contohnya melakukan bisnis obat herbal, pulsa, buku dan servis elektronik.

Direktur Imparsial (*The Indonesian Human Rights Monitor*) Al Araf menyampaikan bahwa pola pendanaan terorisme ini menjadi topik hangat yang dibahas oleh dunia internasional. Sehingga, Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi internasional terkait pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Sindo, 2020).

2.2 Kasus Pendanaan Terorisme Di Filipina

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, Filipina juga merupakan salah satu negara dengan kasus terorisme yang tinggi. Salah satu kelompok teroris yang masih eksis sampai saat ini yaitu Abu Sayyaf Group. Abu Sayyaf Group atau yang berarti pembawa pedang merupakan kelompok terorisme yang didirikan pada tahun 1993 oleh tokoh ulama di Basilan yang bernama Abdulrajak Janjalani. Abdulrajak Janjalani Bersama dengan teroris lain dari Filipina khususnya yang berasal dari Moro pada tahun 1987 telah mengikuti pelatihan militer di Afganistan. Di Afganistan, mereka bertemu dengan Osama bin Laden seorang mujahidin dari Arab Saudi. Osama bin Laden menjanjikan bantuan dana sekaligus pendampingan kepada Abu Sayyaf Group dimana pada saat itu beranggotakan 500 orang. Kemudian pada tahun 1989, Abu Sayyaf Group melakukan rekrutmen anggota dengan mengajak militan-militan lain di Filipina seperti *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Abu Sayyaf sendiri masih terpecah ke dalam kelompok-kelompok, sehingga dapat di sebut sebagai kelompok teroris yang besar dan sangat eksis keberadaannya di Filipina. Adapun tujuan utama dibentuknya kelompok ini yaitu adanya keinginan untuk mendirikan negara islam otonom sendiri dan memisahkan diri dari pemerintah Filipina.

Abu Sayyaf Group ini terkenal dengan kebengisannya dikarenakan untuk memperoleh sumber dana, kelompok ini melakukan berbagai tindak kriminal seperti perampokan, penculikan dan pembunuhan. Secara geografis, Indonesia dan Filipina masih memiliki kedekatan wilayah sehingga disebutkan pula bahwa Filipina ini juga dijadikan sebagai tempat bertarung para kombatan teroris asal

Indonesia yang tersebar ke Mindanao, wilayah selatan Filipina. Teroris Filipina dan Indonesia memiliki hubungan yang erat, terutama sejak munculnya ISIS. Jaringan teroris antar kedua negara ini terus berkomunikasi (Sholih, 2018). Berbagai modus operandi dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ini seperti, pengeboman, serangan bersenjata, pembunuhan, pembajakan pesawat, dan kejahatan maritim. Eksistensi Abu Sayyaf Group telah memunculkan banyak sekali kasus seperti contohnya serangan yang dilakukan di Basilian.

Meskipun sama-sama kelompok muslim di Filipina yang melakukan separatis, Abu Sayyaf Group ini berbeda dengan kelompok MNLF dan MILF. Menurut pakar terorisme, Nasir Abas, Abu Sayyaf ini lebih tidak terkontrol, tidak berpendidikan dan memiliki pengetahuan yang minim. Kelompok ini bersatu atas dasar solidaritas yang kuat antar anggota dengan nasib yang sama yakni merasa terintimidasi dan didiskriminasi oleh pemerintah negara Filipina. Dalam memenuhi kebutuhannya seperti pembelian senjata dan amunisi, mereka melakukan perampokan dan penculikan, kemudian mereka akan meminta tebusan guna memperoleh uang. Ratusan warga Filipina telah diculiknya, terutama orang dengan kulit putih. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menebus atau memenuhi permintaan kelompok tersebut maka nyawa yang menjadi taruhannya, mereka tidak segan membunuh orang yang disanderanya.

Menurut Sidney Jones, direktur *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC), Abu Sayyaf Group berevolusi yang awalnya kelompok teroris menjadi kelompok pelaku tindak kriminal lintas batas negara. Aktivitas pembajakan kapal dan penyanderaan untuk meminta uang tebusan tidak hanya dilakukan kepada

warga negara Filipina saja, namun juga terhadap warga negara lain salah satunya warga negara Indonesia (WNI). Pada peristiwa bom bali, beberapa pelaku bergabung dengan kelompok ini. Abu Sayyaf Group seringkali masih dikaitkan dengan organisasi teroris lain seperti Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Selain itu, mereka juga mempunyai hubungan baik dalam hal operasional maupun dalam hal logistik dengan teroris lain di Filipina sendiri seperti MILF dan MNLF. Adapun sasaran yang seringkali di incar oleh Abu Sayyaf Group antara lain, warga negara asing dari Amerika atau Eropa, politisi lokal, pebisnis dan warga sipil. Lokasi yang seringkali digunakan untuk menjadi target operasi yaitu Mindanao Barat, Kepulauan Sulu, Sabah, Tawi-Tawi dan Zamboanga.

Pada tahun 2016, Abu Sayyaf Group juga pernah menculik 10 awak kapal dari Indonesia yang sedang melewati perbatasan Malaysia. Bukan lain penculikan ini dengan maksud untuk meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan 15 miliar rupiah (Aziz, 2016). Tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Group selain penculikan yakni dengan cara menjual ganja dan hidroklorida metamfetamin (sabu). Hasil penjualan obat-obatan terlarang ini nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan teroris. Bahkan Abu Sayyaf Group juga menjalin hubungan dengan The Hong Kong Triad 14-K dalam transaksi jual beli sabu untuk ditukar dengan alat persenjataan (Lalu Putrawandi Karjaya, 2018).

2.3 Kasus Pendanaan Terorisme Indonesia Dan Filipina

Baik Indonesia maupun Filipina, keduanya mempunyai banyak kasus pendanaan terorisme setiap tahunnya. Sumber dana tersebut diperoleh dari berbagai

sumber. Mulai dari donasi, pendanaan pribadi, penggalangan melalui media sosial sampai suntikan dana dari kelompok teroris besar seperti JI, ISIS dan Al-Qaeda. Berdasarkan data dari *Indonesia's Risk Assessment on Terrorist Financing Crime* yang dikeluarkan oleh PPATK, ditemukan beberapa kasus pendanaan terorisme yang melibatkan warga negara Indonesia dengan warga negara Filipina. Tepatnya pada tahun 2016, telah terjadi transaksi melalui *Non-Bank Licensed Fund Transfer Provider (FTS)* untuk mendanai teroris yang melakukan pengeboman di Thamrin, Jakarta. Inisial AJ memerintahkan inisial AP untuk mengirim uang kepada inisial SM menggunakan nama warga negara Filipina melalui non-bank berlisensi FTS. Dana sejumlah Rp150.000.000 dikirimkan guna membeli senjata api. Kasus pengeboman dan penembakan di jalan MH Thamrin, Jakarta pada 2016 lalu tidak terlepas dari pendanaan dan pembelian senjata api dari Filipina Selatan. Suryadi Mas'ud (SM) merupakan salah satu pemimpin kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terlibat dalam proses pembelian senjata di Filipina. Suryadi mengatakan bahwa dia telah membeli 30 pucuk senjata laras panjang dan 5 pistol (Agus, 2018).

Selain itu, pada Januari 2017 juga terdapat transaksi pendanaan teroris yang melibatkan warga negara Indonesia dengan warga negara Filipina. Melalui telegram, inisial M meminta inisial AP untuk menerima uang tunai dari orang tidak dikenal. Transaksi dilakukan di sebuah kota di Jawa Timur. Kemudian dana berjumlah Rp130.000.000 yang diterima inisial AP ditransfer ke beberapa penerima di Filipina. Transfer dilakukan melalui non-bank berlisensi FTS. Selanjutnya, pada Februari 2017 terjadi kembali transfer ke warga negara Filipina dengan jumlah

Rp333.000.000 melalui media transfer yang sama. Kali ini uang yang diterima berasal dari orang tidak dikenal di Bogor, Jawa Barat. Tidak berhenti sampai disini saja, pada Maret 2017 transaksi Kembali dilakukan dimana AP memperoleh dana di Bekasi, Jawa Barat yang mana akan dikirimkan ke beberapa pihak di Filipina (PPATK, 2019).

Uraian-urain tersebut diatas menunjukkan bahwa kasus pendanaan terorisme masih terjadi dengan berbagai modus seperti melalui donasi dan lembaga amal zakat. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Baik di Indonesia, Filipina maupun keduanya masih mempunyai jaringan yang erat melalui induk organisasi teroris seperti JI, ISIS dan Al-Qaeda, sehingga aliran dana terus berputar untuk sokongan pelatihan militer dan pembelian senjata.